



LUBANG...

Sambungan dari hal 1

Sedangkan pembukaan surat suara kedua, pada saat rekapitulasi untuk PPK Gondokusuman pada Kamis (23/2) kemarin.

PPK Gondokusuman merupakan PPK ke enam yang dilakukan rekapitulasi. Itu setelah sehari sebelumnya menyelesaikan rekapitulasi di Mantrijeron, Mergangsan, Danurejan, Wirobrajan, dan Kotagede hingga Kamis dinihari pukul 01.30.

Saat rekapitulasi hari kedua dimulai, saksi utama pasangan calon wali kota-wakil wali kota nomor urut satu Antonius Fokki Ardiyanto langsung mengajukan keberatan saksi di PPK.

Rekomendasi dari Panwascam tidak ditindaklanjuti oleh PPK Gondokusuman, itu terkait keberatan saksi Paslon IP-Fadli di kecamatan yang tidak ditanggapi. Akhirnya, Panwas Kota

Jogja merekomendasikan untuk membuka surat suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru saat rekapitulasi di KPU Kota Jogja kemarin.

Petugas mengambil kotak suara tidak sah di TPS 4 Kotabaru di gudang KPU Kota Jogja di Umbulharjo. Saat dihitung ulang jumlah suara tidak sah yakni 18. Fokki menghendaki 18 surat suara tidak sah tersebut diperlihatkan.

"Karena dari laporan saksi kami ada beberapa coblosan yang sah dimasukkan ke kotak tidak sah," ujarnya.

Saat diperlihatkan, dari 18 surat suara tidak sah tersebut, terdapat dua surat suara yang mencoblos di kotak paslon nomor satu tapi dianggap tidak sah. Alasannya, karena lubang yang terlalu besar.

"Kami menganggap sah lubang besar bekas coblosan karena memang mungkin saking semangatnya nyoblos," kata Fokki.

Tapi, saksi utama paslon HS-HP Nurcahyo Nugroho beranggapan tidak sah. Alasannya, karena lubang coblosan terlalu besar jika dicoblos dengan paku. "Jika dengan paku lubangnya tidak sebesar ini, jadi tetap tidak sah," ungkapnya.

KPPS TPS 4 Kotabaru Haryanto yang dihadirkan, mengatakan, surat suara tersebut

dinyatakan tidak sah karena dianggap mencoblos tidak dengan alat coblos yang disediakan, yaitu paku.

Hal itu melihat lubang coblosan yang dinilai terlalu besar jika dicoblos dengan paku.

"Saat perhitungan (di TPS) ada keberatan dari saksi paslon dua dan diwajibkan saksi paslon satu, sehingga dinyatakannya tidak sah karena mencoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan," ujarnya.

Terkait hal itu, Fokki sempat menanyakan ke Haryanto apakah penilaian dicoblos bukan dengan alat coblos tersebut merupakan asumsi atau melihat langsung. Fokki juga menanyakan apakah disediakan alat coblos selain paku. "Tidak," jawab Haryanto.

Fokki pun mengembalikan ke KPU Kota Jogja terkait nasib dua surat suara tersebut.

"Kami masih memegang sah, tapi saksi paslon dua pasti menyatakan tidak sah, kami minta KPU yang menentukan, kalau tetap dinyatakan tidak sah kami ajukan surat keberatan, tapi ka-

lau sah, terima kasih, lumayan dua suara," ujar Fokki.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto yang dimintai keputusannya, mengatakan, sesuai peraturannya semua proses perhitungan suara dilakukan di TPS, sehingga pihaknya mengakui hasil perhitungan KPPS.

Menurut dia, berdasarkan buku panduan yang dibagikan ke KPPS, surat suara dinyatakan tidak sah jika dicoblos bukan dengan alat coblos yang disediakan.

"Sesuai prosedur KPPS sudah sesuai aturannya juga perhitungan suara ada di KPPS, kami ikuti hasil KPPS," ujarnya.

Sambil menunggu pengambilan kotak suara di gudang KPU Kota Jogja, proses rekapitulasi tetap dilanjutkan untuk PPK Pakualaman dan Gondomanan. Bahkan untuk rekapitulasi di Pakualaman mencatatkan rekor rekapitulasi tercepat, hanya sekitar 15 menit.

"Sebelum dimulai saya bacakan form D5 (keberatan saksi) nihil," ujar Wawan.

Meski di PPK nihil, dalam rekapitulasi saksi IP-Fadli di KPU Kota

Jogja tetap mengajukan keberatan, seperti di kecamatan lainnya.

Sebelumnya pada Rabu malam, rekapitulasi suara PPK Danurejan juga memutuskan mengambil tiga kotak suara dari tiga TPS di Danurejan dari Kelurahan Tegalgunggun dan Bausasran, yang akhirnya harus diambilkan dari gudang KPU Kota Jogja di Umbulharjo untuk dibawa ke kantor KPU Kota Jogja.

"Karena Panwas merekomendasikan membuka sampul surat suara rusak yang berisi surat suara rusak, ya kami buka, tapi yang minimal terdapat lima surat suara rusak, setelah diidentifikasi ada tiga TPS yang surat suara rusaknya lima," ujar Wawan.

Hingga pukul 18.00 kemarin, sudah delapan PPK yang melaksanakan rekapitulasi.

Cermati Lagi DPT

Sementara itu, pencermatan kembali daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan oleh tim pemenangan paslon IP-Fadli. Itu dilakukan di Kricak, Tegalrejo.

Wakil Ketua DPD PDIP Eko Suwanto mengatakan, masalah DPT menjadi perhatian khusus karena ada hak warga negara untuk memilih dihilangkan. Banyaknya surat suara tidak sah yang mencapai 14.000 lebih, lanjutnya, membawa banyak dugaan terjadinya kecurangan, kejangalan atau ada upaya sistematis menghilangkan hak pilih seseorang.

Kemarin (23/2) Eko dan timnya turun langsung ke Kricak Kidul. Sebab, di sana diduga banyak warga yang sudah meninggal namun masih mendapatkan undangan memilih. Salah satu-

nya ditemukan di Kricak Kidul RT 39/RW 09 Tegalrejo.

Warga yang meninggal tapi masih menerima surat undangan C6 untuk memilih dalam pilwali diungkapkan oleh Marwan Arpans. Warga Kricak ini menunjukkan lokasi tempat ibunya dimakamkan di pemakaman umum Kricak Kidul tak jauh dari rumahnya.

Dia menjelaskan, ibunya masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Namun, surat undangan telah dikembalikan lagi ke petugas KPPS setempat.

Orang meninggal yang masih terekam dalam DPT juga ditemukan atas nama Marsidi atau Hadi Marwanto yang beralamat di Kricak, Tegalrejo dan dimakamkan ke pemakaman umum Kelurahan Bener, Tegalrejo. (pra/sky/lla/ga)



SETIYAKY & KUSUMA RADAR JOGJA

KLARIFIKASI KE PEMILIH: Wakil Ketua DPD PDIP Eko Suwanto cek langsung ke pemakaman umum di Tegalrejo. Dia kembali mencermati DPT, sebab warga yang meninggal masih terdaftar sebagai pemilih.

DUGAAN KECURANGAN DPT

- Warga meninggal mendapat undangan untuk memilih.
- Lokasi: Kricak Kidul RT 39, RW 09, Kecamatan Tegalrejo, Kota Jogja.
- Dugaan jumlah suara tidak sah mencapai belasan ribu.
- Dampak: dugaan terjadinya kecurangan.



HERPFI KARTUN RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005